



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

**RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2018**

**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**JL. GAYUNG KEBONSARI NO. 167  
SURABAYA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada Tahun 2018 berpedoman pada perubahan RPJMD yang dilatarbelakangi terbitnya Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2014 -2019, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018.
3. Renja merupakan hasil sinkronisasi rancangan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat.

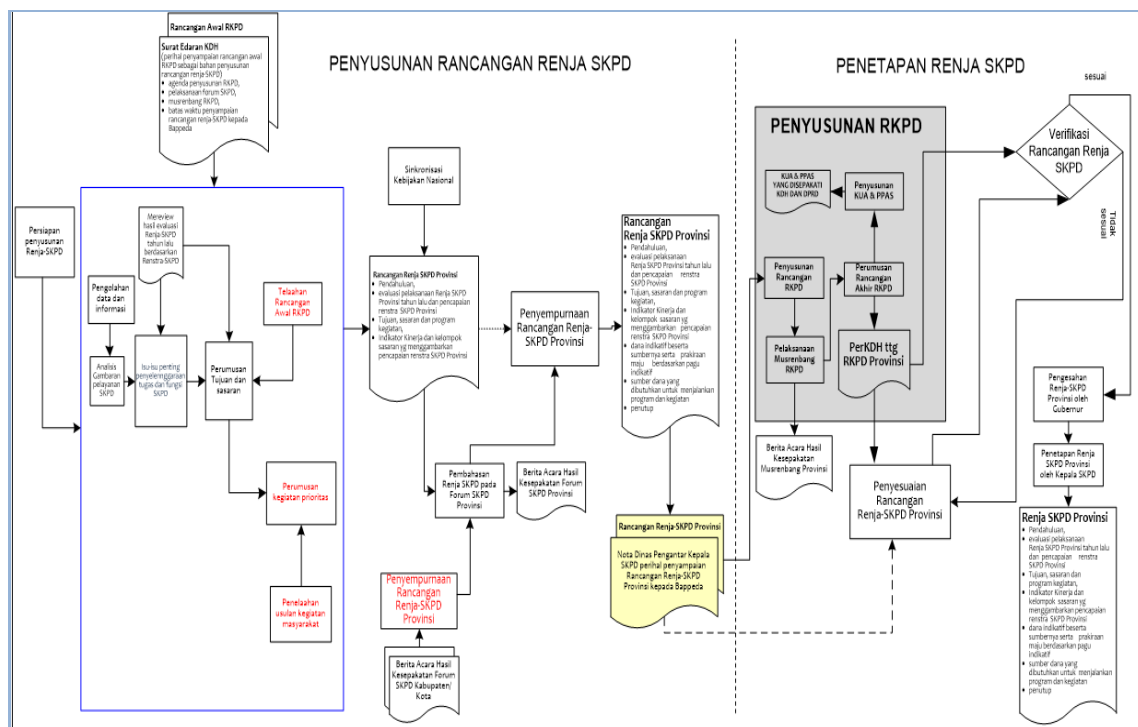
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD telah mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

**Gambar 1.1**  
Bagan Alir Penyusunan Renja SKPD Provinsi



## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2014-2019;
14. Permen PU Nomor 13/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
15. Permen PU Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;

16. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
21. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 -2019.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dimaksudkan sebagai upaya untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur selama tahun 2018.

#### **b. Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 bertujuan sebagai panduan awal dalam menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia, selanjutnya program kegiatan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2018.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2018 adalah sebagai berikut :

##### **1. Penetapan Indikator Kinerja**

Untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilakukan melalui penetapan indikator kinerja berupa ukuran kuantitatif dan kualitatif.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur (RPJMD Jatim 2014-2019) meliputi :

1. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional.
2. Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan.
3. Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan.
4. Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jembatan lintas selatan.

##### **2. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2016**

Pada Tahun 2016 Jumlah Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 807.841.900.785,- dengan rincian :

- |                           |     |                   |
|---------------------------|-----|-------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. | 192.036.767.400,- |
| b. Belanja Langsung       | Rp. | 615.805.133.385,- |

Pada Perubahan APBD Tahun 2016 mengalami perubahan alokasi dana menjadi sebesar Rp. 792.644.452.385,- dengan rincian :

- |                           |     |                   |
|---------------------------|-----|-------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. | 164.881.227.000,- |
| b. Belanja Langsung       | Rp. | 627.763.225.385,- |

Dari jumlah Belanja Daerah tersebut di atas telah terealisasi sebesar Rp. 762.616.148.888,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96,21% dan Capaian fisik sebesar 100 %, dengan rincian sesuai Tabel 2.1.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai tabel 2.2.

## **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis**

### **1. Koordinasi dan Sinergi Program**

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur melakukan berkoordinasi dengan Dinas PU Bina Marga Kabupaten/Kota melalui kegiatan Musrenbang Provinsi serta dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum melalui Kegiatan Konferensi Regional dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

### **2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi**

- Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur sebagian besar masih bertumpu pada Retribusi Daerah, terutama yang bersumber dari pemanfaatan bahu jalan dan median jalan pada ruas jalan provinsi.
- Kurang disiplinnya masyarakat pengguna jalan terhadap batasan muatan kendaraan dan musim penghujan merupakan faktor yang dominan penyebab kerusakan jalan.
- Pembangunan jalan lintas selatan masih terkesan lambat sebagai dampak dari sulitnya pembebasan lahan dan kurangnya dukungan dana sehingga perlu dicarikan pola pembiayaan alternatif.
- Terus bertambahnya PNS tenaga teknis yang purna tugas mempengaruhi kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan, hal ini



dikarenakan tenaga PNS yang ada mayoritas adalah berlatar belakang pendidikan non teknis.

#### **2.4. Review terhadap Renja Awal**

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja maka dilakukan perubahan terhadap target dan alokasi dana terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dengan penyesuaian sesuai tabel 2.3, adapun perubahan rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2018 telah diuraikan pada tabel 2.4.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 tidak memiliki kegiatan yang berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur adalah sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/128/KPTS/013/2016 tanggal 12 Pebruari 2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut statusnya sebagai Jalan Provinsi dan kegiatan pembangunan jalan baru.

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **4.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur mendukung terhadap Kebijakan Nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) Misi yang dijabarkan ke dalam sasaran pokok berdasarkan tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Agenda Prioritas Nasional yang disusun dalam 9 Agenda Prioritas (Nawacita) yaitu :

1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan.
4. Akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.
6. Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

7. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Akan melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi untuk mendukung kemandirian ekonomi agar keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan kesejahteraan ekonomi masyarakat terjaga sebagaimana tercermin pada sasaran pokok bidang ekonomi dan bidang sosial.
2. Meningkatnya penerapan peduli alam dan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yang tercermin pada membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).
3. Membaiknya tata kelola pembangunan berkelanjutan, yang tercermin pada meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik, serta menurunnya tingkat korupsi.

#### **4.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD**

Renja merupakan penjabaran dari pernyataan Rencana Strategis sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai pada masa mendatang, oleh sebab itu tujuan disusunnya Renja SKPD untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing - masing Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/ agroindustri dan industrialisasi.
3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang.
4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Dari kelima misi Provinsi Jawa Timur tersebut diatas, maka **misi kedua** adalah misi yang **harus diemban Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi**

**Jawa Timur.** Misi kedua tersebut untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif) sekaligus meningkat kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi melalui 8 (delapan) tujuan yaitu:

1. Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan koperasi.
2. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
3. Meningkatkan ketahanan pangan.
4. Meningkatkan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri.
5. Meningkatkan percepatan kinerja sektor industry.
6. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata.
7. Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri serta investasi daerah.
8. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

#### **4.3. Program dan Kegiatan**

Prasarana jalan merupakan moda transportasi yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional, regional maupun lokal, dalam melayani mobilitas orang, barang, jasa, distribusi komoditi, perdagangan dan industri seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan serta sebagai penunjang, pendorong, penggerak pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah dengan mengembangkan sistim jaringan jalan yang terpadu menjangkau seluruh pelosok wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai fungsi Pelayanan Publik. Selain itu jalan juga merupakan bagian dari prasarana dan sarana transportasi darat yang sampai saat ini masih mendominasi pertumbuhannya dibandingkan dengan transportasi lainnya sehingga perlu mendapat perhatian.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan jaringan Jalan yang ada dengan mengacu Standart Pelayanan Minimal telah dilakukan upaya-upaya pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program tahunan dengan mempertimbangkan skala prioritas yaitu Pemeliharaan Rutin Jalan,

Pemeliharaan Berkala (Periodic Maintenance), Peningkatan struktur/kapasitas, dan Pembangunan Jalan baru.

Keberadaan infrastruktur yang memadai dan strategis sangat diperlukan untuk mendukung berjalannya roda perekonomian yang antara lain untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur telah dilakukan perubahan sesuai tabel 3.1.

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 disusun berdasarkan usulan masyarakat, hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi, dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dalam menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 untuk menunjang tercapainya Visi dan Misi Provinsi Jawa Timur serta target dan sasaran pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur adalah faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra 2014–2019.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.